

# PEDOMAN KURIKULUM

Program Studi  
Administrasi Pembangunan Negara  
Program Sarjana Terapan



2025



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA TERAPAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta diperlukan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA TERAPAN PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

Pasal 1

Kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 2

- (1) Kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta sebagaimana diatur dengan Peraturan Direktur STIA LAN Jakarta Nomor 12 tahun 2025 tentang Pedoman Kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara tetap berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta yang diterima pada pada Tahun Akademik 2025/2026.

- (2) Pada saat seluruh mahasiswa Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Jakarta yang diterima pada Tahun Akademik 2025/2026 dinyatakan lulus dan/atau sudah tidak ada lagi terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta maka Peraturan Direktur Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pedoman Kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2026

DIREKTUR  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,



NURLIAH NURDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR  
POLITEKNIK STIA LAN Jakarta  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN KURIKULUM  
PROGRAM SARJANA TERAPAN  
PROGRAM STUDI  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

## **IDENTITAS PROGRAM STUDI**

Nama Perguruan Tinggi : Politeknik STIA LAN

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Pembangunan Negara (APN)

Jenjang Pendidikan : Sarjana Terapan

Gelar : S.Tr.AP

Visi Keilmuan : Unggul dalam bidang Administrasi Pembangunan  
Negara yang Inovatif Berlandaskan Etika dan  
Adaptabilitas Teknologi serta Berdaya Saing  
Internasional

## **PENGANTAR**

Upaya penguatan tata kelola akademik serta peningkatan mutu pembelajaran pada Program Studi Administrasi Pembangunan Negara (Prodi APN) Program Sarjana Terapan merupakan bagian dari komitmen institusi dalam memenuhi tuntutan pembangunan nasional dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Pedoman Kurikulum ini dirumuskan untuk menjawab tantangan perkembangan bidang administrasi publik dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terapan, berintegritas, dan mampu melaksanakan pengelolaan program maupun kebijakan pembangunan secara profesional dan inovatif. Penyusunan pedoman kurikulum ini berpedoman pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), asosiasi Administrasi Publik serta visi Politeknik STIA LAN Jakarta.

Kurikulum Prodi APN Program Sarjana Terapan disusun dengan penekanan pada penguasaan keahlian terapan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja, melalui perpaduan antara dasar-dasar teoritik yang kokoh dan kemampuan praktis yang relevan. Struktur kurikulum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis permasalahan administrasi dan pembangunan; merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan layanan publik; memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan; serta menginisiasi inovasi yang sejalan dengan perkembangan birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada *student-centered learning*, berbasis masalah dan proyek, serta diperkuat melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja, termasuk magang, dan penyusunan tugas akhir terapan.

Institusi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan kurikulum ini, termasuk pimpinan institusi, tim pengembang kurikulum, dosen, tenaga kependidikan, mitra instansi pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Diharapkan dokumen kurikulum ini dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, relevan, serta responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. Semoga kurikulum ini mampu menghasilkan lulusan Prodi APN yang profesional, beretika, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki daya saing pada tingkat nasional maupun internasional.

**Tim Penyusun Kurikulum**



# **BAB I**

## **LANDASAN HUKUM**

Berikut beberapa landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik.
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan.
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 547/K.1/HKM.02.02/2019 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analis Kebijakan.

## **BAB II**

### **PERANGKAT KURIKULUM**

#### **A. Analisis Konsiderans**

Pedoman kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan (APN) disusun berdasarkan empat konsiderans, yaitu konsiderans Siap Kerja atau Siap Usaha, Kajian Banding Kurikulum, perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) terkini, dan deskripsi jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut:



**Gambar 1 Konsiderans dalam Merancang Capaian Pembelajaran Lulusan**

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024)

#### **1. Siap Kerja/Siap Usaha**

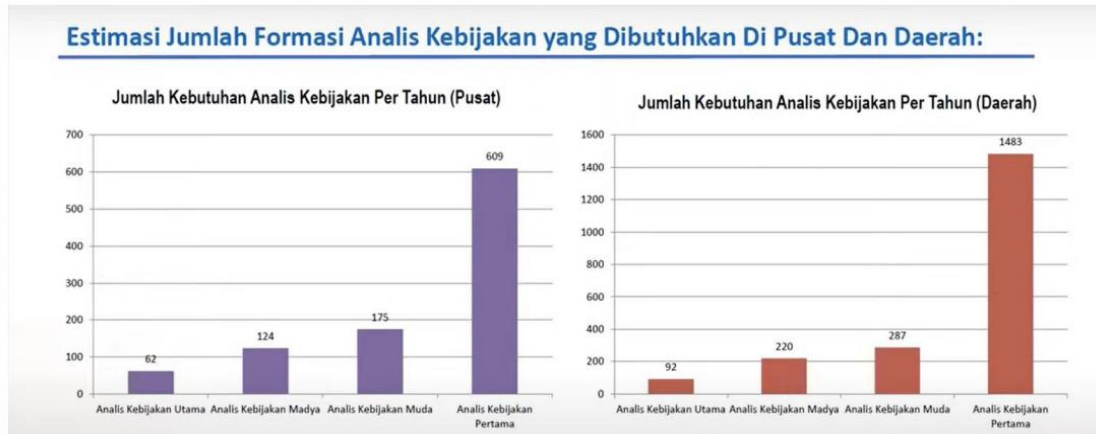
Sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, maka Kurikulum Program Sarana Terapan Program Studi APN diarahkan untuk mencapai profil lulusan sebagai berikut:

1. Pelaksana Pelayanan Publik Jenjang Pertama

Mempraktikkan pelayanan prima serta memberikan die pelayanan prima berbasis teknologi informasi

2. Pelaksana Pembangunan Jenjang Pertama  
Mengadministrasikan program pembangunan berbasis kolaborasi
3. Analisis SDM Aparatur Jenjang Pertama  
Mengimplementasikan perangkat analisis fungsi Manajemen SDM Aparatur berbasis kebutuhan dan target kinerja organisasi
4. Analis Kebijakan Jenjang Pertama  
Mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas tertentu menggunakan metode dan kaidah ilmiah.
5. Administrator/Manajer Sektor Publik Jenjang Pertama  
Memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang menjalankan nilai-nilai publik

Dalam mendukung pencapaian profil lulusan tersebut, maka mahasiswa dibekali dengan kompetensi yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi kompetensi yang mendukung masing-masing profil lulusan, sehingga dapat dipastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi siap kerja. Berdasarkan proyeksi kebutuhan pasar kerja yang telah dilakukan pada tahun 2024, khususnya untuk kompetensi analisis kebijakan publik, proyeksi kebutuhan analisis kebijakan dilakukan dengan mencatat proyeksi kebutuhan analisis kebijakan ahli pertama berdasarkan estimasi kebutuhan JFAK pusat dan daerah yang telah dihitung oleh Lembaga Administrasi Negara selaku instansi pembina dan membandingkannya dengan pemenuhan jabatan. Berikut adalah hasil telaah LAN terkait estimasi kebutuhan JFAK di pemerintah Pusat dan Daerah setiap tahunnya.



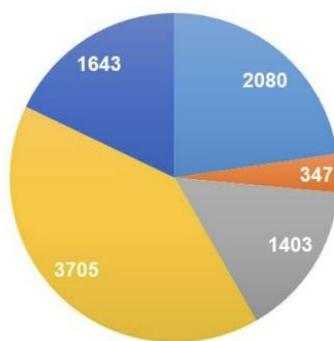
**Gambar 2 Grafik Estimasi Jumlah Formasi Analisis Kebijakan yang dibutuhkan di Pusat dan Daerah**

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (2022)

Berdasarkan diagram tersebut, estimasi kebutuhan JFAK pertahun di pusat dan daerah yang paling besar adalah JFAK Pertama yaitu sebesar 609 orang dibutuhkan di pusat dan 1.483 orang dibutuhkan di daerah. Sehingga total kebutuhan JFAK pertama di Indonesia pertahun adalah sebesar 2.092 orang. Namun sayangnya sampai tahun 2024, jumlah JFAK Pertama di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

### Sebaran JFAK

Januari 2024



■ Kementerian  
■ Pemkab  
■ Pemprov  
■ Pemkot  
■ LPNK



**Gambar 3 Sebaran JFAK Tahun 2024**

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (2024)

Diagram diatas menunjukkan bahwa, pada Januari 2024 Jumlah JFAK Ahli Pertama adalah sebanyak 663 orang. Dengan rincian 52 orang adalah JFAK Ahli Pertama ditingkat pemerintah daerah dan 581 orang adalah JFAK Ahli Pertama ditingkat pemerintah pusat. Data diatas menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum bisa memenuhi kebutuhan minimal JFAK, sebagaimana yang telah diestimasikan oleh LAN. Berikut adalah perbandingan estimasi kebutuhan dan pemenuhan JFAK Ahli Pertama di tahun 2024.

**Tabel 1 Perbandingan Estimasi Kebutuhan dan Pemenuhan JFAK Ahli Pertama Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024**

| Level  | Kebutuhan | *Jumlah JFAK Ahli Pertama | Presentase Pemenuhan |
|--------|-----------|---------------------------|----------------------|
| Pusat  | 609       | 581                       | 95,4%                |
| Daerah | 1483      | 52                        | 3,5%                 |

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum dapat memenuhi kebutuhan JFAK ahli pertama. Pemerintah pusat mampu memenuhi sebesar 95,4% jumlah JFAK Ahli Pertama, namun pemerintah daerah hanya mampu memenuhi sebesar 3,5% jumlah JFAK Ahli Pertama. Berdasarkan data diatas, maka proyeksi kebutuhan JFAK Ahli Pertama yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Proyeksi Kebutuhan JFAK Ahli Pertama Tahun 2025**

| Level Pemerintah | Tahun 2025 |
|------------------|------------|
| Pusat            | 28         |
| Daerah           | 1431       |

Sumber: Data yang diolah

Pada tahun 2023 terdapat 153 instansi pemerintah yang mengikuti pengukuran IKK. Hasil rekapitulasi data nasional pengukuran IKK yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara menunjukkan bahwa sebanyak 46 % instansi mendapatkan predikat kurang, 17% instansi mendapat predikat cukup, 22% instansi mendapat predikat baik, 14% instansi mendapat predikat sangat baik dan hanya 1% instansi yang berhasil memperoleh predikat unggul. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebijakan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan perbandingan antara proyeksi jumlah JFAK Ahli Pertama dan pemenuhan jumlah JFAK, maka terlihat bahwa sampai dengan tahun 2024 kebutuhan JFAK Ahli Pertama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum bisa terpenuhi. Bahkan ditingkat pemerintah daerah masih sangat jauh dari estimasi yang diperkirakan. Jika dilihat berdasarkan data yang ada, maka saat ini masih dibutuhkan sebanyak 1.459 JFAK Ahli Pertama. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3 Proyeksi Total Kebutuhan JFAK Ahli Pertama**

| <b>Level Pemerintah</b> | <b>Tahun 2025</b> |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Pusat</b>            | <b>28</b>         |
| <b>Daerah</b>           | <b>1431</b>       |
| <b>Total</b>            | <b>1.459</b>      |

Sumber: Data yang diolah

Analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia. Hal ini seiring dengan masih rendahnya kualitas kebijakan di Indonesia yang telah ditunjukkan dengan banyaknya Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dibatalkan/revisi yaitu sebanyak 3.143; masih rendahnya indeks kualitas kebijakan sebagaimana yang dipublikasikan oleh *The Global Economy, Regulatory Index Quality* yaitu pada tahun 2021 negara Indonesia menempati peringkat 66 dari 192 Negara di Dunia dengan nilai 0.3, sedangkan di tingkat Asia menduduki peringkat ke 15 dari 47 Negara; serta pada tahun 2023, berdasarkan hasil rekapitulasi data nasional pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara, dari 157 instansi pemerintah yang mengikuti pengukuran IKK, diperoleh 46 % instansi mendapatkan predikat kurang, 17% instansi mendapat predikat cukup, 22% instansi mendapat predikat baik, 14% instansi mendapat predikat sangat baik dan hanya 1% instansi yang berhasil memperoleh predikat unggul.

Rendahnya kualitas kebijakan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini perlu adanya SDM Analisis Kebijakan baik secara kuantitas maupun kualitas yang mampu memberikan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Secara kuantitas, sampai saat ini jumlah JFAK khususnya ahli pertama masih belum memenuhi estimasi yang diharapkan. Dari 2.092 JFAK Ahli Pertama yang dibutuhkan hanya sebesar

633 yang dipenuhi, artinya masih ada kebutuhan sebanyak 1.459 JFAK Ahli Pertama.

Selain itu dengan adanya amanah untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi yang berimplikasi pada peralihan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional salah satunya JFAK. Peralihan jabatan ini juga membutuhkan pembekalan kompetensi sebagai analis kebijakan. Pada dasarnya terdapat beberapa mekanisme yang mendasari PNS untuk bergabung menjadi JFAK yaitu melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* ASN dari jabatan struktural, perpindahan dari jabatan lain, dan pengajuan Jabatan Fungsional AK untuk kali pertama. Secara umum pasar kerja analis kebijakan cukup terbuka luas bagi mahasiswa lulusan Program Sarjana Terapan Prodi APN. Hal ini seiring dengan posisi strategis Program Sarjana Terapan Prodi APN sebagai bagian dari Lembaga Administrasi Negara yang merupakan Pembina Analis Kebijakan. Program Sarjana Terapan Prodi APN memiliki peran strategis sebagai hub (penghubung) antara komponen ekosistem kebijakan yaitu pemroduksi pengetahuan tentang kebijakan (akademisi, dosen, mahasiswa) dan perantara kebijakan (analis kebijakan), dengan pengambil kebijakan yaitu para pejabat eselon I dan II dalam diklat PKN I dan II LAN dan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) LAN. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan dalam kurikulum khususnya aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Umum mengacu pada SN-Dikti dan IAPA.

Untuk memperkuat ciri khas terapan di Prodi APN, maka CPL dalam kurikulum khususnya aspek Keterampilan Khusus mengacu pada SKKNI Analis Kebijakan dan KKKNI Analis Kebijakan. Namun pemenuhan jabatan di sektor publik khususnya dalam pengangkatan jabatan pertama sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 9 September 2020 perihal pengangkatan kedalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional yang belum diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian kedalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar, maka berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa persyaratan mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina melalui pengangkatan

pertama, dihapus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sejak tahun 2017 pelaksanaan seleksi kompetensi bidang Calon PNS menggunakan naskah soal yang menitikberatkan pada bidang tugas masing-masing jabatan fungsional yang pada prinsipnya merupakan bagian dari uji kompetensi. Artinya, Calon PNS yang mengikuti seleksi pada tahun 2017 dan seterusnya dapat langsung diangkat ke dalam formasi yang dilamar setelah memenuhi persyaratan menjadi PNS dan diangkat sebagai PNS. Demikian halnya dengan JFAK Ahli Pertama, dengan adanya kebijakan ini maka yang akan menjadi ASN harus mengikuti seleksi nasional.

Dengan demikian, kebutuhan terhadap profil lulusan khususnya analisis kebijakan yang kompeten, berintegritas, dan mampu bekerja dalam kerangka profesional birokrasi menjadi semakin mendesak. Prodi Administrasi Pembangunan Negara dituntut untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kapasitas analitis, keterampilan metodologis, serta kemampuan teknis yang sesuai dengan standar kompetensi Analisis Kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam SKKNI dan KKNi. Selain itu, kebijakan seleksi nasional bagi calon ASN, termasuk untuk Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, menegaskan bahwa hanya individu dengan kompetensi substantif yang kuat yang dapat bersaing dan memenuhi tuntutan jabatan tersebut. Oleh karena itu, kurikulum Prodi APN harus mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk memasuki dan berkontribusi dalam jabatan fungsional strategis tersebut. Urgensi ini menempatkan Prodi APN sebagai penyedia sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kebutuhan birokrasi modern, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi vokasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

## **2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni Terkini**

Perkembangan industri dan teknologi global telah mendorong transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan praktik administrasi publik. Saat ini, sektor administrasi publik dihadapkan pada tuntutan digitalisasi yang semakin luas melalui penerapan *e-Government*, *smart governance*, dan *open government data*. Berbagai industri teknologi global seperti IBM, Google, SAP, dan Microsoft telah menghasilkan platform inovatif untuk manajemen pemerintahan berbasis data dan integrasi sistem layanan publik secara digital. Selain itu, teknologi seperti *Artificial Intelligence*



(AI), *cloud computing*, *blockchain*, dan *Internet of Things (IoT)* mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Di tingkat global, institusi seperti World Bank, OECD, dan UNDP juga mendorong adopsi teknologi tersebut dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, peran sumber daya manusia dalam sektor administrasi publik juga mengalami perubahan. Kebutuhan akan aparatur yang tidak hanya memahami administrasi konvensional, tetapi juga mampu mengelola data digital, memimpin perubahan organisasi, serta mendorong inovasi sosial menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kecenderungan industri saat ini menuntut lulusan yang memiliki kemampuan adaptif, kolaboratif, dan melek teknologi informasi sebagai bagian dari profesionalisme baru di sektor publik.

Kurikulum Prodi APN disusun mengikuti perkembangan IPTEKS terkini. Berikut literasi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan Program Sarjana Terapan Prodi APN:

a. Literasi Membaca

Literasi membaca penting untuk menyerap informasi kompleks, membandingkan referensi, serta membuat interpretasi yang akurat dalam menyusun rekomendasi atau laporan kebijakan. Tanpa membaca yang baik, lulusan akan kesulitan dalam mengikuti dinamika regulasi dan kebijakan yang cepat berubah. Melalui literasi membaca, lulusan diharapkan mampu memahami dokumen resmi seperti peraturan, kebijakan, laporan kinerja, serta pedoman teknis pelayanan publik dan pembangunan.

b. Literasi Berpikir Kritis

Literasi berpikir kritis dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tidak bias, terutama sebagai analis kebijakan atau manajer publik. Literasi ini diharapkan dapat mencegah pengambilan keputusan berdasarkan asumsi tanpa verifikasi fakta. Melalui literasi ini lulusan diharapkan mampu mengevaluasi kebijakan, menganalisis masalah publik, serta merumuskan solusi berbasis logika dan bukti.

c. Literasi Digital

Literasi digital sangat dibutuhkan pada Era Industri 4.0 untuk mendukung pelayanan publik berbasis teknologi, efisiensi pelayanan, pengelolaan data, komunikasi antar lembaga dan keterbukaan

informasi publik. Tanpa literasi digital lulusan akan tertinggal dalam mendukung transformasi digital sektor publik.

d. Literasi Kebijakan Publik

Literasi kebijakan publik dibutuhkan dalam memahami bagaimana kebijakan disusun, diimplementasikan, dan dievaluasi. Literasi ini juga penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang berkembang. Melalui literasi ini mahasiswa dibekali dengan kerangka berpikir kebijakan untuk menjadi analis yang kompeten.

e. Literasi Administrasi Publik & Tata Kelola Pemerintahan

Literasi administrasi publik dan tata kelola pemerintahan menjadi dasar untuk bekerja di lembaga pemerintahan, BUMN, atau organisasi sektor publik lainnya. Tanpa literasi ini, lulusan akan kesulitan beradaptasi dalam sistem pemerintahan yang kompleks. Melalui literasi ini lulusan mampu memahami fungsi, struktur, dan dinamika birokrasi serta prinsip *good governance*.

f. Literasi Data dan Informasi

Literasi data dan informasi penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik. Melalui literasi ini lulusan akan memiliki kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data secara informatif baik secara deskriptif maupun analitis.

g. Literasi Kolaboratif & Inovasi Sosial

Literasi kolaboratif & inovasi sosial penting dalam konteks *co-creation* layanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Literasi ini membekali lulusan untuk membangun sinergi, kerja lintas sektor dan mendorong partisipasi masyarakat.

h. Literasi Hukum dan Etika Publik

Literasi hukum dan etika publik penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan dan korupsi. Literasi ini juga penting untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalisme kerja. Melalui literasi ini mahasiswa diharapkan memahami aturan yang menjadi dasar kerja mereka.

i. Literasi Media

Literasi media penting dalam mengelola komunikasi publik, terutama saat krisis, perubahan kebijakan atau inovasi layanan. Melalui literasi

ini lulusan dapat memahami cara kerja media dan dampaknya terhadap opini publik dan legitimasi kebijakan. Selain itu lulusan dapat mengenali informasi yang valid dan menangkal hoaks yang bisa mempengaruhi persepsi publik.

### 3. Level KKNi

Jenjang KKNi Prodi APN Politeknik STIA LAN Jakarta telah disesuaikan dengan jenjang KKNi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, yang dicirikan dengan turunan dari Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi. Selain itu Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Berdasarkan jenjang tersebut, lulusan diharapkan memiliki kemampuan dalam menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

### B. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan

Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mahasiswa Program Sarjana Terapan Prodi APN adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Profil Lulusan dan CPL yang dibebankan**

| PROFIL LULUSAN                             | DESKRIPSI PROFIL LULUSAN                                                                        | KODE  | CPL                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksana Pelayanan Publik Jenjang Pertama | Mempraktikkan pelayanan prima serta memberikan ide pelayanan prima berbasis teknologi informasi | CPL 1 | Mampu menguasai konsep dasar dan terapan dalam administrasi serta pelayanan publik secara komprehensif dengan perspektif pembangunan nasional yang inovatif dan berdaya saing global. |
|                                            |                                                                                                 | CPL 2 | Mampu merancang berbagai alternatif pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara adaptif, responsif, dan berorientasi pada inovasi.                                           |

| PROFIL LULUSAN                        | DESKRIPSI PROFIL LULUSAN                                                                                                                                                                       | KODE  | CPL                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                | CPL 3 | Mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas tinggi, serta inklusif.                                                                        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                | CPL 4 | Mampu merumuskan solusi pelayanan publik yang inovatif dan etis, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.                           |
| Pelaksana Pembangunan Jenjang Pertama | Mengadministrasikan program pembangunan berbasis kolaborasi                                                                                                                                    | CPL 5 | Mampu menguasai perencanaan dan pengawasan pembangunan yang berbasis bukti ( <i>evidence-based</i> ) dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan inovatif. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                | CPL 6 | Mampu mengkomunikasikan, mengadvokasi, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan dinamika global dan tuntutan lokal.               |
| Analisis SDM Aparatur Jenjang Pertama | Mengimplementasikan perangkat analisis fungsi Manajemen SDM Aparatur berbasis kebutuhan dan target kinerja organisasi                                                                          | CPL 7 | Mampu menguasai konsep dan praktik manajemen serta kebijakan sumber daya manusia aparatur yang modern, adaptif, dan berorientasi pada standar internasional.   |
| Analisis Kebijakan Jenjang Pertama    | Mengolah informasi sebagai pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah kebijakan dalam ruang lingkup dan kompleksitas tertentu menggunakan metode dan kaidah ilmiah | CPL8  | Mampu menguasai teori dan teknik analisis kebijakan publik dengan perspektif etis dan ilmiah.                                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                | CPL9  | Mampu mengolah dan menyajikan informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan berwawasan ke depan.                                  |

| PROFIL LULUSAN                                          | DESKRIPSI PROFIL LULUSAN                                                                                                             | KODE  | CPL                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator/<br>Manajer Sektor Publik Jenjang Pertama | Memimpin dan mengelola organisasi pemerintah, swasta, nirlaba, atau badan usaha milik pemerintah yang menjalankan nilai-nilai publik | CPL10 | Mampu menyusun analisis kebijakan publik yang kompleks secara kritis, integratif, dan inklusif pada tingkat nasional dan global.                            |
|                                                         |                                                                                                                                      | CPL11 | Mampu menguasai konsep dan praktik manajemen publik, teori organisasi, keuangan publik, dan kepemimpinan, dengan kemampuan merancang inovasi sektor publik. |
|                                                         |                                                                                                                                      | CPL12 | Mampu memimpin dan mengelola organisasi publik, swasta, maupun nirlaba secara kolaboratif, etis, dan profesional                                            |

Berdasarkan visi keilmuan prodi untuk “Unggul dalam bidang Administrasi Pembangunan Negara yang Inovatif Berlandaskan Etika dan Adaptabilitas Teknologi serta Berdaya Saing Internasional”, maka dirumuskanlah Profil Profesional Mandiri (PPM)/Tujuan Pendidikan Program (*Program Educational Objectives*) sebagai target capaian lulusan. PPM ini mendeskripsikan peran dan pencapaian yang diharapkan dapat diraih oleh lulusan dalam 3 hingga 5 tahun setelah menyelesaikan studi, baik dalam pencapaian profesional, pencapaian akademik, maupun pencapaian umum/sosial yang peranannya dapat dilihat dari berbagai sektor baik akademisi, pemerintah, swasta, komunitas / NGO, dan juga media.

#### 1. *Professional Accomplishment*

Lulusan mampu berperan sebagai tenaga profesional pada jenjang pertama di sektor publik yang mengelola program dan layanan publik secara efektif, menerapkan inovasi dalam pemecahan masalah pembangunan, serta menunjukkan kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk berkontribusi pada kinerja organisasi yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Pencapaian profesional ini diwujudkan melalui peran lulusan sebagai *Strategic Policy Leader* di pemerintahan yang terlibat dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan layanan publik. Di sektor swasta dan BUMN, lulusan berperan sebagai

*Corporate Development Strategist* yang mendukung pengembangan organisasi, program keberlanjutan, dan pengelolaan relasi publik. Pada organisasi masyarakat/NGO, lulusan menjalankan peran profesional dalam pengelolaan program pembangunan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk dalam konteks kerja sama nasional dan internasional.

## 2. *Academic Accomplishment*

Lulusan mampu mengembangkan diri melalui pendidikan sepanjang hayat, formal maupun non-formal guna memastikan pengetahuan dan keterampilannya relevan dengan dinamika kebijakan publik, tata Kelola pemerintahan, perkembangan teknologi, serta tuntutan professional yang mendorong daya saing internasional.

Pencapaian akademik ini tercermin pada peran lulusan sebagai *Public Knowledge Architect* di lingkungan akademik dan riset. Di pemerintahan, swasta, dan NGO, peran akademik diwujudkan melalui kemampuan menggunakan pengetahuan dan analisis berbasis bukti untuk mendukung pengambilan keputusan, evaluasi program, dan perumusan kebijakan.

## 3. *General/ Social Accomplishment*

Lulusan menjunjung tinggi etika profesi, bertindak dengan integritas, mampu bekerja sama dan memimpin dalam tim lintas sektor, serta berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan public dan pembangunan, termasuk dalam konteks kolaborasi nasional maupun internasional.

Pencapaian sosial ini diwujudkan melalui peran lulusan sebagai *Community Impact Enabler* yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di komunitas dan juga desa/kota, sebagai *Public Insight Communicator* yang menerjemahkan isu kebijakan dan pembangunan ke dalam komunikasi publik yang inklusif di media dan ruang publik, serta sebagai *Social Innovation Founder* yang menginisiasi solusi inovatif dan berkelanjutan melalui kewirausahaan sosial. Seluruh peran tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai etika, integritas, dan tanggung jawab sosial.

### C. Materi Pembelajaran Pendukung Capaian Pembelajaran

Materi pembelajaran pendukung capaian pembelajaran dalam Program Studi APN adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 Materi Pembelajaran Pendukung CPL**

| KODE  | CPL                                                                                                                                                                                   | Materi Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPL 1 | Mampu menguasai konsep dasar dan terapan dalam administrasi serta pelayanan publik secara komprehensif dengan perspektif pembangunan nasional yang inovatif dan berdaya saing global. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Konsep dasar administrasi publik dan administrasi pembangunan negara</li><li>• Teori pelayanan publik dan pelayanan prima di instansi pemerintah</li><li>• Sistem administrasi negara</li><li>• Isu pembangunan nasional, good governance, dan pelayanan publik berdaya saing.</li></ul>                                                            |
| CPL 2 | Mampu merancang berbagai alternatif pelayanan publik berbasis teknologi informasi secara adaptif, responsif, dan berorientasi pada inovasi.                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dasar-dasar pemanfaatan TI dalam administrasi dan pelayanan publik</li><li>• Desain proses bisnis layanan (alur layanan, SOP, service blueprint).</li><li>• Pengantar layanan digital (e-service, portal layanan, aplikasi mobile) dan prinsip keamanan/kerahasiaan data</li><li>• Studi kasus inovasi pelayanan publik di pusat/daerah.</li></ul>  |
| CPL 3 | Mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas tinggi, serta inklusif.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Etika pelayanan publik dan etika profesi aparatur</li><li>• Komunikasi pelayanan, manajemen keluhan, dan teknik pelayanan prima di loket/tatap muka/digital</li><li>• Standar kualitas layanan (kecepatan, ketepatan, keramahan, inklusivitas)</li><li>• Pelayanan untuk kelompok rentan, perspektif HAM, dan inklusivitas sosial-budaya.</li></ul> |
| CPL 4 | Mampu merumuskan solusi pelayanan publik yang inovatif dan etis, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi masalah pelayanan (survei kepuasan, pengaduan, FGD)</li><li>• Pendekatan design thinking dan inovasi pelayanan publik</li><li>• Kerangka etika pelayanan publik, perlindungan data pribadi, dan regulasi terkait</li><li>• Perancangan proposal inovasi pelayanan publik beserta rencana implementasi.</li></ul>                       |

| KODE  | CPL                                                                                                                                                          | Materi Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPL 5 | Mampu menguasai perencanaan dan pengawasan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based) dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan inovatif.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem perencanaan pembangunan (RPJPN, RPJMN, RPJMD, Renstra)</li> <li>• Konsep pembangunan partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan</li> <li>• Teknik penyusunan rencana program/proyek, logframe, dan indikator kinerja</li> <li>• Teknik dan praktik pengawasan pembangunan</li> </ul>                                                             |
| CPL 6 | Mampu mengkomunikasikan, mengadvokasi, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan dinamika global dan tuntutan lokal.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder mapping)</li> <li>• Strategi komunikasi dan advokasi kebijakan</li> <li>• Manajemen implementasi program dan proyek pembangunan</li> <li>• Dinamika global lokal (SDGs, agenda nasional, tuntutan lokal) dalam kebijakan pembangunan</li> </ul>                                                 |
| CPL 7 | Mampu menguasai konsep dan praktik manajemen serta kebijakan sumber daya manusia aparatur yang modern, adaptif, dan berorientasi pada standar internasional. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep manajemen SDM sektor publik</li> <li>• Regulasi ASN, sistem merit, manajemen talenta, dan standar kompetensi</li> <li>• Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan pemetaan kompetensi</li> <li>• Sistem penilaian kinerja aparatur (SKP, KPI) dan keterkaitannya dengan akuntabilitas kinerja</li> </ul>                                      |
| CPL8  | Mampu menguasai teori dan teknik analisis kebijakan publik dengan perspektif etis dan ilmiah.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori kebijakan publik dan <i>policy cycle</i></li> <li>• Model-model analisis kebijakan (cost-benefit, cost-effectiveness, multi-criteria)</li> <li>• Prinsip etika kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>• Studi kasus analisis kebijakan pada sektor-sektor kunci pembangunan.</li> </ul>                                       |
| CPL9  | Mampu mengolah dan menyajikan informasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data dan berwawasan ke depan.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode pengumpulan data kebijakan (survei, FGD, wawancara, studi dokumen)</li> <li>• Pengolahan dan analisis data (kuantitatif dan kualitatif) untuk kebijakan</li> <li>• Visualisasi dan penyajian informasi (tabel, grafik, infografis, ringkasan eksekutif)</li> <li>• Penyusunan policy brief dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.</li> </ul> |



| KODE  | CPL                                                                                                                                                         | Materi Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPL10 | Mampu menyusun analisis kebijakan publik yang kompleks secara kritis, integratif, dan inklusif pada tingkat nasional dan global.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kebijakan lintas sektor dan multi-level</li> <li>• Pendekatan integratif (sosial, ekonomi, politik, lingkungan) dan inklusif dalam analisis kebijakan</li> <li>• Analisis skenario dan foresight kebijakan publik</li> <li>• Penyusunan laporan analisis kebijakan komprehensif</li> </ul> |
| CPL11 | Mampu menguasai konsep dan praktik manajemen publik, teori organisasi, keuangan publik, dan kepemimpinan, dengan kemampuan merancang inovasi sektor publik. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori organisasi dan manajemen publik</li> <li>• Dasar keuangan publik dan penganggaran</li> <li>• Konsep dan praktik kepemimpinan publik</li> <li>• Studi kasus inovasi sektor publik dan reformasi birokrasi</li> </ul>                                                                           |
| CPL12 | Mampu memimpin dan mengelola organisasi publik, swasta, maupun nirlaba secara kolaboratif, etis, dan profesional                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemimpinan kolaboratif dan etis di sektor publik</li> <li>• Manajemen tim, koordinasi lintas unit/lembaga, dan manajemen konflik.</li> <li>• Teknik fasilitasi rapat, negosiasi, dan manajemen perubahan</li> <li>• Proyek/penugasan perancangan perbaikan organisasi/unit layanan</li> </ul>     |

#### D. Struktur Mata Kuliah, Beban Belajar per Mata Kuliah, Organisasi Mata Kuliah dan Peta Kurikulum

CPL tersebut akan didistribusikan pada mata kuliah pada Program Sarjana Terapan Prodi APN Politeknik STIA LAN. Berikut adalah distribusi mata kuliahnya:

##### 1. Struktur Mata Kuliah

**Tabel 6 Struktur Mata Kuliah Program Studi APN Politeknik STIA LAN**

| Semester | Kode    | Mata Kuliah      | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS praktik | Keterangan     |
|----------|---------|------------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 1        | MKWN101 | Agama            | 2          | 2         | 0           | Wajib Nasional |
| 1        | MKWN102 | Pancasila        | 2          | 2         | 0           | Wajib Nasional |
| 1        | MKWN103 | Bahasa Indonesia | 2          | 1         | 1           | Wajib Nasional |

| Semester                   | Kode    | Mata Kuliah                                            | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS praktik | Keterangan     |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------|
| 1                          | MKWI101 | Dasar-Dasar Ilmu Administrasi                          | 3          | 3         | 0           | Institusi      |
| 1                          | MKWI102 | Dasar-dasar Kebijakan Publik                           | 3          | 3         | 0           | Institusi      |
| 1                          | MKP1101 | Sosial Budaya Pembangunan                              | 3          | 3         | 0           | Prodi          |
| 1                          | MKP1102 | <i>Electronic Office Application</i>                   | 3          | 0         | 3           | Prodi          |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                        | <b>18</b>  | <b>14</b> | <b>4</b>    | <b>4</b>       |
| 2                          | MKWN204 | Kewarganegaraan                                        | 2          | 2         | 0           | Wajib Nasional |
| 2                          | MKP1203 | Administrasi Pembangunan                               | 3          | 3         | 0           | Prodi          |
| 2                          | MKWI203 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3          | 3         | 0           | Institusi      |
| 2                          | MKP1204 | Ekonomi Pembangunan                                    | 3          | 2         | 1           | Prodi          |
| 2                          | MKP1205 | Politik Pembangunan                                    | 3          | 3         | 0           | Prodi          |
| 2                          | MKWI204 | <i>English for Specific Purposes</i>                   | 3          | 1         | 2           | Institusi      |
| 2                          | MKP1206 | Hukum Administrasi Negara                              | 3          | 2         | 1           | Prodi          |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                        | <b>20</b>  | <b>16</b> | <b>4</b>    |                |
| 3                          | MKP1307 | Teknik dan Praktik Formulasi Kebijakan                 | 3          | 0         | 3           | Prodi          |
| 3                          | MKP1308 | Analisis Aspek Kewilayahan dan Geospasial              | 3          | 1         | 2           | Prodi          |
| 3                          | MKP1309 | Penganggaran dan Pembiayaan Pembangunan                | 3          | 1         | 2           | Prodi          |
| 3                          | MKWI305 | Kepemimpinan                                           | 3          | 2         | 1           | Institusi      |
| 3                          | MKWI306 | Pengambilan Keputusan                                  | 3          | 1         | 2           | Institusi      |
| 3                          | MKP1310 | Organisasi dan Manajemen Publik                        | 3          | 2         | 1           | Prodi          |
| 3                          | MKWI107 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik            | 3          | 2         | 1           | Institusi      |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                        | <b>21</b>  | <b>9</b>  | <b>12</b>   |                |
| 4                          | MKP1411 | Pemerintahan Daerah                                    | 3          | 2         | 1           | Prodi          |
| 4                          | MKP1412 | Manajemen Pelayanan Publik                             | 3          | 2         | 1           | Prodi          |
| 4                          | MKP1413 | Teknik dan Praktik Perencanaan Pembangunan             | 3          | 1         | 2           | Prodi          |
| 4                          | MKWI408 | Inovasi Sektor Publik                                  | 3          | 1         | 2           | Institusi      |
| 4                          | MKP1414 | Statistika Terapan                                     | 3          | 1         | 2           | Prodi          |
| 4                          | MKP1415 | Etika Administrasi                                     | 3          | 2         | 1           | Prodi          |

| Semester                   | Kode    | Mata Kuliah                                          | Jumlah SKS | SKS Teori | SKS praktik | Keterangan |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 4                          | MKP1416 | Teknik dan Praktik Implementasi Kebijakan            | 3          | 0         | 3           | Prodi      |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                      | <b>21</b>  | <b>9</b>  | <b>12</b>   |            |
| 5                          | MKP1517 | Teknik dan Praktik Manajemen Program dan Proyek      | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 5                          | MKP1518 | Teknik dan Praktik Pengadaan Barang dan Jasa         | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 5                          | MKP1519 | Praktik Pelayanan Publik                             | 3          | 0         | 3           | Prodi      |
| 5                          | MKP1520 | Metode Penelitian Administrasi                       | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 5                          | MKP1521 | Teknik dan Praktik Pengawasan Pembangunan            | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 5                          | MKP1522 | Kewirausahaan Sosial                                 | 3          | 0         | 3           | Prodi      |
| 5                          | MKP1523 | Teknik dan Praktik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan | 3          | 0         | 3           | Prodi      |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                      | <b>21</b>  | <b>4</b>  | <b>17</b>   |            |
| 6                          | MKP1624 | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                     | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 6                          | MKP1625 | Advokasi dan Komunikasi Kebijakan                    | 3          | 0         | 3           | Prodi      |
| 6                          | MKP1626 | Digital Governance dan Big Data                      | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 6                          | MKP1627 | Desain Riset                                         | 3          | 0         | 3           | Prodi      |
| 6                          | MKL1601 | Mata Kuliah di Luar Program Studi                    | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| 6                          | MKL1602 | Mata Kuliah di Luar Program Studi                    | 3          | 1         | 2           | Prodi      |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                      | <b>18</b>  | <b>4</b>  | <b>14</b>   |            |
| 7                          |         | Magang                                               | 20         | 0         | 20          | Institusi  |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                      | <b>20</b>  | <b>0</b>  | <b>20</b>   |            |
| 8                          |         | Tugas Akhir                                          | 6          | 0         | 6           | Prodi      |
| <b>JUMLAH SKS SEMESTER</b> |         |                                                      | <b>6</b>   | <b>0</b>  | <b>6</b>    |            |
| <b>JUMLAH TOTAL SKS</b>    |         |                                                      | <b>145</b> | <b>56</b> | <b>89</b>   |            |

## 2. Beban Belajar per Mata Kuliah

Penentuan beban belajar (SKS) mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- CPL yang dibebankan terhadap mata kuliah, yang selanjutnya diturunkan menjadi tujuan belajar mata kuliah, dan Kemampuan Akhir yang Direncanakan (KAD);
- Kedalaman dan keluasan Materi Pembelajaran (MP);
- Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih;

- d. Beban belajar mahasiswa untuk 1 (satu) satuan kredit semester (sks) adalah 45 jam per semester; dan
- e. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajar/KAD mata kuliah yang berkontribusi terhadap pemenuhan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah. Waktu yang dibutuhkan diestimasi pada saat merancang pembelajaran/menyusun draft RPS yang kemudian dikonversi dalam besaran SKS.

**Tabel 7 Bentuk dan Metode Pembelajaran**

| <b>Bentuk Pembelajaran</b>     | <b>Fokus Utama</b>                                                   | <b>Metode Pembelajaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Proses Belajar        | Penugasan konsep, diskusi terarah, pengutan keterampilan berpikir    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah interaktif dan tanya jawab</li> <li>• Diskusi kelompok kecil (small group discussion)</li> <li>• Studi kasus dan analisis masalah</li> <li>• Role play/simulasi situasi layanan/kebijakan</li> <li>• Problem Based Learning (PBL)</li> <li>• Project Based Learning (PjBL)</li> <li>• Seminar kelas dan presentasi.</li> </ul>                                        |
| Kegiatan Penugasan Terstruktur | Pendalaman materi di luar kelas dengan arahan jelas dari dosen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugas membaca terarah dan ringkasan materi</li> <li>• Lembar kerja/studi kasus tertulis</li> <li>• Mini research / tugas lapangan sederhana dengan panduan</li> <li>• Penyusunan policy brief, makalah pendek, atau laporan analisis</li> <li>• Pengerjaan latihan soal/aplikasi konsep dengan format yang sudah ditentukan.</li> </ul>                                       |
| Kegiatan Mandiri               | Belajar otonom berbasis inisiatif mahasiswa untuk memperkuat capaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Self-directed learning: eksplorasi referensi (buku, jurnal, regulasi, data) dan membuat catatan/refleksi</li> <li>• Menyusun portofolio pribadi (logbook magang, refleksi praktik, e-portfolio)</li> <li>• Belajar melalui modul daring, video, LMS, atau microlearning</li> <li>• Pengembangan proyek individu (gagasan inovasi layanan, rancangan program, dsb.)</li> </ul> |
| Praktikum                      | Penugasan keterampilan praktis, prosedur kerja dan sikap profesional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrasi dan simulation/demonstration oleh dosen/praktisi</li> <li>• Latihan terstruktur langkah demi langkah</li> <li>• Praktik langsung di laboratorium/studio/sistem/aplikasi (mis. e-office, SIM, aplikasi data)</li> </ul>                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simulasi pelayanan publik, simulasi rapat, atau simulasi pengambilan keputusan</li> <li>• Praktik lapangan/kunjungan instansi sebagai work-based learning.</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Organisasi Mata Kuliah

Organisasi Mata Kuliah merupakan bagian penting dalam penyusunan dan pengelolaan kurikulum di pendidikan tinggi vokasi. Pengorganisasian mata kuliah adalah proses penataan dan penempatan setiap mata kuliah ke dalam struktur kurikulum berdasarkan peran, fungsi, urutan, serta keterkaitannya dalam mendukung pencapaian CPL. Tujuan utama organisasi mata kuliah adalah memastikan tahapan pembelajaran mahasiswa berjalan secara logis, sistematis, dan efisien sehingga masing-masing mata kuliah berkontribusi optimal terhadap profil lulusan yang diharapkan. Dengan penyusunan organisasi mata kuliah yang tepat, program studi dapat menjamin proses pembelajaran berlangsung terstruktur, dapat diakses dengan baik oleh mahasiswa, serta mendorong terciptanya lulusan yang kompeten dan relevan bagi kebutuhan dunia kerja dan industri.

**Tabel 8 Organisasi Mata Kuliah**

| Sem | SKS | Jumlah MK | Daftar Mata Kuliah                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  | Pembelajaran di Luar Program Studi |                     |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|
|     |     |           | MK Wajib Institusi dan Program Studi |                  |                  |                  |                  |                  | MK Wajib Nasional |                  |                  | PTV Internal/Lain                  | Lembaga di Luar PTV |
| 1   | 18  | 7         | MKWI101<br>3 SKS                     | MKWI102<br>3 SKS | MKP11P1<br>3 SKS | MKP1102<br>3 SKS |                  |                  |                   | MKWN101<br>2 SKS | MKWN102<br>2 SKS | MKWN103<br>2 SKS                   |                     |
| 2   | 20  | 7         | MKP1203<br>3 SKS                     | MKWI203<br>3 SKS | MKP1204<br>3 SKS | MKP1205<br>3 SKS | MKWI204<br>3 SKS | MKP1206<br>3 SKS |                   | MKWN204<br>2 SKS |                  |                                    |                     |
| 3   | 21  | 7         | MKP1307<br>3 SKS                     | MKP1308<br>3 SKS | MKP1309<br>3 SKS | MKWI305<br>3 SKS | MKWI306<br>3 SKS | MKP1310<br>3 SKS | MKWI107<br>3 SKS  |                  |                  |                                    |                     |
| 4   | 21  | 7         | MKP1411<br>3 SKS                     | MKP1412<br>3 SKS | MKP1413<br>3 SKS | MKWI408<br>3 SKS | MKP1414<br>3 SKS | MKP1415<br>3 SKS | MKP1416<br>3 SKS  |                  |                  |                                    |                     |
| 5   | 21  | 7         | MKP1517<br>3 SKS                     | MKP1518<br>3 SKS | MKP1519<br>3 SKS | MKP1520<br>3 SKS | MKP1521<br>3 SKS | MKP1522<br>3 SKS | MKP1523<br>3 SKS  |                  |                  |                                    |                     |
| 6   | 18  | 6         | MKP1624<br>3 SKS                     | MKP1625<br>3 SKS | MKP1626<br>3 SKS | MKP1627<br>3 SKS |                  |                  |                   |                  |                  | MKL1601<br>3 SKS                   | MKL1602<br>3 SKS    |
| 7   | 20  | 1         |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                                    | MKWI709<br>20SKS    |
| 8   | 6   | 1         | MKWI810<br>3 SKS                     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                                    |                     |

Blok hijau menandakan contoh implementasi magang wajib vokasi pada program Sarjana Terapan sesuai Permendikbudristek No 53 Pasal 18 ayat 5. Blok biru menandakan contoh MBKM terstruktur/paket dimana mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar di luar program studi/ perguruan tinggi sesuai Permendikbudristek No 53 Pasal 18 ayat 6.

#### **4. Peta Kurikulum**

Peta kurikulum adalah cara untuk menyesuaikan antara luaran yang akan dihasilkan dari proses belajar dengan CPL, yang membantu proses asesmen kurikulum, serta mengidentifikasi kesenjangan pada kurikulum.

**Tabel 9 Peta Kurikulum dan Bobot**

| NO | Kode MK | Mata Kuliah                                            | CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | CPL 8 | CPL 9 | CPL1 0 | CPL1 1 | CPL1 2 |
|----|---------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1  | MKWN101 | Agama                                                  |       |       | 5     | 2.5   |       |       |       |       |       |        |        | 5      |
| 2  | MKWN102 | Pancasila                                              |       |       | 5     | 2.5   |       |       |       |       |       |        |        | 5      |
| 3  | MKWN103 | Bahasa Indonesia                                       |       |       | 5     |       |       | 5     |       |       |       |        |        |        |
| 4  | MKWI101 | Dasar-Dasar Ilmu Administrasi                          | 30    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 5  | MKWI102 | Dasar-dasar Kebijakan Publik                           |       |       |       |       |       |       |       | 20    | 5     |        |        |        |
| 6  | MKP1101 | Sosial Budaya Pembangunan                              |       |       |       | 5     | 10    | 5     |       |       |       |        |        |        |
| 7  | MKP1102 | <i>Electronic Office Application</i>                   |       | 10    | 10    |       |       |       |       |       |       |        |        |        |
| 8  | MKWN204 | Kewarganegaraan                                        |       |       | 5     | 5     |       |       |       |       |       |        |        | 5      |
| 9  | MKP1203 | Administrasi Pembangunan                               |       |       |       |       | 10    |       |       |       |       |        |        |        |
| 10 | MKWI203 | Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia | 20    |       |       |       |       |       | 15    |       |       |        |        |        |
| 11 | MKP1204 | Ekonomi Pembangunan                                    |       |       |       |       | 10    |       |       |       |       |        | 10     |        |
| 12 | MKP1205 | Politik Pembangunan                                    |       |       |       | 5     |       | 5     |       |       |       |        |        |        |
| 13 | MKWI204 | <i>English for Specific Purposes</i>                   | 25    |       |       |       |       |       |       |       |       | 10     |        |        |
| 14 | MKP1206 | Hukum Administrasi Negara                              |       |       |       |       |       | 5     |       |       | 5     |        |        |        |
| 15 | MKP1307 | Teknik dan Praktik Formulasi Kebijakan                 |       |       |       |       |       |       |       | 30    | 5     | 30     |        |        |
| 16 | MKP1308 | Analisis Aspek Kewilayahan dan Geospasial              |       | 10    |       |       | 10    |       |       |       | 10    |        |        |        |
| 17 | MKP1309 | Penganggaran dan Pembiayaan Pembangunan                |       |       |       |       | 10    |       |       |       |       |        | 10     |        |
| 18 | MKWI305 | Kepemimpinan                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 10     | 15     |
| 19 | MKWI306 | Pengambilan Keputusan                                  |       |       |       | 5     |       |       |       |       | 5     |        |        | 15     |
| 20 | MKP1310 | Organisasi dan Manajemen Publik                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 10     | 15     |
| 21 | MKWI107 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik            |       |       |       |       |       |       | 35    |       |       |        |        |        |

|    |         |                                                      |     |      |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |
|----|---------|------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 22 | MKP1411 | Pemerintahan Daerah                                  |     |      |     | 5   | 5   |      |     |     |      |     |     |     |
| 23 | MKP1412 | Manajemen Pelayanan Publik                           | 25  |      | 10  | 5   |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 24 | MKP1413 | Teknik dan Praktik Perencanaan Pembangunan           |     |      |     |     | 15  | 15   |     |     |      |     |     |     |
| 25 | MKWI408 | Inovasi Sektor Publik                                |     | 12,5 |     | 10  |     |      |     |     |      |     | 10  |     |
| 26 | MKP1414 | Statistika Terapan                                   |     |      |     |     |     |      |     |     | 12,5 |     |     |     |
| 27 | MKP1415 | Etika Administrasi                                   |     |      | 15  | 5   |     |      |     |     |      |     |     | 10  |
| 28 | MKP1416 | Teknik dan Praktik Implementasi Kebijakan            |     |      |     |     |     | 20   |     |     |      |     |     |     |
| 29 | MKP1517 | Teknik dan Praktik Manajemen Program dan Proyek      |     | 12,5 |     |     |     | 12,5 |     |     |      |     |     |     |
| 30 | MKP1518 | Teknik dan praktik Pengadaan Barang dan Jasa         |     |      |     |     | 10  |      |     |     |      |     | 10  |     |
| 31 | MKP1519 | Praktik Pelayanan Publik                             |     | 12,5 | 25  | 10  |     |      |     |     |      |     |     | 10  |
| 32 | MKP1520 | Metode Penelitian Administrasi                       |     |      |     |     |     |      |     | 25  | 10   |     |     |     |
| 33 | MKP1521 | Teknik dan Praktik Pengawasan Pembangunan            |     |      |     |     | 10  | 12,5 |     |     |      |     |     |     |
| 34 | MKP1522 | Kewirausahaan Sosial                                 |     | 12,5 |     | 5   |     |      |     |     |      |     | 10  |     |
| 35 | MKP1523 | Teknik dan Praktik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan |     |      |     |     |     |      |     | 25  | 5    | 30  |     |     |
| 36 | MKP1624 | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                     |     |      |     |     | 10  |      |     |     | 5    |     | 10  |     |
| 37 | MKP1625 | Advokasi dan Komunikasi Kebijakan                    |     |      |     |     |     | 20   |     |     | 10   | 30  |     |     |
| 38 | MKP1626 | Digital Governance dan Big Data                      |     | 10   |     | 15  |     |      |     |     | 5    |     |     |     |
| 39 | MKP1627 | Desain Riset                                         |     |      |     |     |     |      |     |     | 12,5 |     |     |     |
| 40 | MKL1601 | Mata Kuliah di Luar Program Studi                    |     |      |     |     |     |      | 25  |     |      |     |     | 10  |
| 41 | MKL1602 | Mata Kuliah di Luar Program Studi                    |     |      |     |     |     |      | 25  |     |      |     |     | 10  |
| 42 | MKWI709 | Magang                                               |     | 20   | 20  | 20  |     |      |     |     |      |     |     |     |
| 43 | MKWI810 | Tugas Akhir                                          |     |      |     |     |     |      |     |     | 10   |     |     |     |
|    |         | <b>TOTAL</b>                                         | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 |



#### **E. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran. RPS yang akan digunakan dalam mendukung pembelajaran mata kuliah di Prodi APN Politeknik STIA LAN Jakarta dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB III**

### **IMPLEMENTASI KURIKULUM**

#### **A. Proses Pembelajaran Secara Umum**

Proses pembelajaran pada Prodi APN dirancang sebagai sistem dinamis berbasis kompetensi terapan, mengintegrasikan prinsip dengan kebutuhan analisis kebijakan dan kebutuhan pembangunan nasional serta tuntutan revolusi 4.0. Prinsip dasar pembelajaran adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang humanis dan pengelolaan pengetahuan kontekstual. Proses pembelajaran menciptakan ekosistem yang inklusif dan kolaboratif dengan menghargai keragaman latar belakang mahasiswa. Seluruh aktivitas bermuara pada konstruksi pengetahuan berbasis realitas di mana mahasiswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga praktik antara lain untuk membongkar kompleksitas isu aktual di bidang administrasi pembangunan negara. Misalnya untuk topik-topik dengan isu desentralisasi, tata kelola global, dan SDGs. Mahasiswa juga dipandu untuk dapat merancang solusi implementatif melalui simulasi kebijakan.

Metode pembelajaran efektif memanfaatkan dominasi pendekatan praktik. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pengantar teori sebelum mahasiswa bereksplorasi dengan praktik. Terdapat beberapa metode yang dilakukan antara lain pembelajaran berbasis proyek, misalnya penyusunan policy brief sebagai salah satu media komunikasi bagi analisis kebijakan. Studi kasus interaktif juga dilakukan dengan menggunakan beberapa bahan kajian dan data dari Kementerian/Lembaga bahkan Badan Penelitian dan Pengembangan di pusat maupun daerah. Pada akhir pertemuan tiap semester, dimungkinkan untuk dilaksanakan pameran karya atau pameran prototipe kebijakan maupun poster ilmiah sebagai salah satu bentuk diseminasi proyek. Selain itu, optimasi teknologi digital juga dilakukan untuk mendukung metode pembelajaran yang efektif.

Transformasi peran mahasiswa dalam ekosistem belajar ditunjukkan dengan mendorong kemandirian mahasiswa sebagai agen pembelajaran

aktif melalui kegiatan belajar mengajar yang berbasis praktik. Mahasiswa didorong untuk aktif misalnya dengan pembuatan dokumen kebijakan dan magang berbasis proyek di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dosen berfungsi sebagai fasilitator dan katalisator dengan peningkatan kompetensi wajib. Maka dosen juga perlu meningkatkan kompetensi dengan mengeksplorasi desain pembelajaran terbaru, asesmen portofolio dan rubrik proyek, dan berkolaborasi dengan dosen tamu/praktisi dalam pembelajaran di kelas. Untuk mendukung pembelajaran tersebut, perlu infrastruktur pendukung seperti sumber belajar digital dan penjaminan mutu proses. Perlunya audit rutin terhadap kualitas interaksi belajar dan peningkatan alokasi anggaran khusus pengembangan *digital learning resources*.

Selain itu, pembelajaran di Program Sarjana Terapan Prodi APN menganut prinsip kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta *lifelong learning*, dimana pendidikan formal di Politeknik STIA LAN Jakarta hanya salah satu bagian kecil dari proses pembelajaran yang akan berjalan seumur hidup. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mengutamakan otonomi pembelajar/*heutagogi* yang dikombinasikan dengan *pedagogy* dan *andragogy* sesuai umur pembelajar. Metode pembelajaran dengan komposisi minimal 60% praktik. Bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Belajar terbimbing;
  - b. Penugasan terstruktur; dan/atau
  - c. Mandiri.
2. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
3. Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lainnya.

Program Sarjana Terapan Prodi APNP memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dalam bentuk:

1. Pembelajaran dalam Program studi yang berbeda pada Poltek STIA LAN. Mahasiswa prodi APN dapat memilih mata kuliah di luar prodi sebanyak 2 (dua) mata kuliah. Mata Kuliah di Luar Prodi terdiri dari 1 (satu) mata kuliah dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA) dan 1 (satu) mata kuliah dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP)
2. Pembelajaran dalam Program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada Poltek STIA LAN Bandung/Jakarta/Makassar; atau
3. Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.

#### **B. Proses Pembelajaran Mata Kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia**

Pembelajaran Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sudah diberikan kepada mahasiswa sejak PAUD dan berlangsung selama 15 tahun hingga lulus Sekolah Menengah Atas. Pembelajaran Agama diberikan agar lulusan bertaqwa kepada Tuhan YME dan memiliki akhlak yang baik sehingga mampu bertindak sebagai warga negara yang sadar akan konsekuensi perbuatan baik dan buruk, serta mempunyai empati terhadap kesulitan yang dihadapi sesama manusia. Pembelajaran agama diharapkan membentuk moral lulusan untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian masyarakat di dalam negara dan antar negara, serta menjaga kelestarian bumi. Penyajian mata kuliah Pancasila merupakan sarana pembelajaran untuk menghayati makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lulusan diharapkan mampu menjadi pribadi yang berketuhanan, berbudi pekerti luhur, bersikap toleransi, menghargai keragaman SARA, menghormati antar sesama, memiliki nasionalisme yang tinggi atas

NKRI, berjiwa gotong royong dan empati terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Mata kuliah Kewarganegaraan diberikan untuk membentuk wawasan kenegaraan, kecintaan kepada negara, bangsa, tanah, air, rasa nasionalisme dan kebanggaan lulusan sebagai warga negara Indonesia penerus bangsa. Intinya adalah bagaimana menjadikan mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik. Peran penting Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tujuan utama pembelajaran Bahasa Indonesia adalah untuk memastikan lulusan memaknai penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan memahami fungsinya sebagai bahasa resmi negara yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia juga dipandang sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk mendukung: Persatuan bangsa, Kedaulatan NKRI, Kehormatan bangsa dan negara, Kebangsaan Indonesia, ke-Bhineka Tunggal Ika-an Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, ras, dan golongan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan seluruh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Mengingat proses pembelajaran Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sudah dilakukan oleh calon mahasiswa selama lima belas tahun sejak PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK, maka pada PTV, pembelajaran mata kuliah tersebut sudah harus difokuskan pada

aplikasi atau terapannya untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa metoda pembelajaran yang digunakan yaitu Studi Kasus/*Case Study*, Pembelajaran Berbasis Proyek/*Project Based Learning*, Pembelajaran Berbasis Masalah/*Problem Based Learning and Inquiry*, dan Pembelajaran Berbasis Produk/*Product Oriented Learning*.

Untuk penjelasan rinci dari bentuk pembelajaran ini dapat dilihat pada berbagai kasus yang sangat relevan untuk didiskusikan, diselesaikan, dijadikan proyek atau produk yang didesain untuk menyelesaikan masalah kebangsaan.

Beberapa contoh kasus: Untuk Agama adalah bagaimana caranya membangun akhlak dan moral, mencegah atau menyelesaikan (i) masalah menyontek, (ii) plagiarisme, (iii) intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang marak terjadi di beberapa kampus atau lingkungan belajar, (iv) masalah pelecehan seksual dalam lingkungan kampus, dll. Dosen dapat mendesain RPS dengan mengambil berbagai kasus dan membimbing mahasiswa untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Untuk Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi menghasilkan konsep pemikiran atau praktik (i) melaksanakan gotong royong, (ii) mencegah atau menyelesaikan permasalahan keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih merata, (iii) masalah korupsi, (iv) masalah KDRT dan pelecehan seksual dalam keluarga, (v) mencegah upaya memecah belah berbagai elemen bangsa, (vi) mencerdaskan masyarakat terkait dengan politik, (vii) ekonomi untuk rakyat termarginalkan, (viii) pelestarian budaya nusantara yang menjadi jati diri bangsa dan warisan leluhur, (ix) konservasi hutan, lingkungan dan penanganan sampah, dan masih banyak lainnya. Dosen dapat mendesain RPS terkait dengan aplikasi pemahaman Pancasila dan Kewarganegaraan dengan target menjadi warga negara yang baik. Untuk Bahasa Indonesia, studi kasus, proyek, produk dapat diarahkan untuk penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam: 1. peraturan perundang-

undangan; 2. dokumen resmi negara; 3. pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri; 4. pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan; 5. nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia; 6. forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; 7. komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta; 8. laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan; 9. penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; 10. nama geografi di Indonesia; 11. nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia; 12. informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia; 13. rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan 14. informasi melalui media massa. Proses diskusi dan penulisan argumen harus didasarkan pada kemampuan mahasiswa berpikir kritis, sehingga mata kuliah berpikir kritis harus menjadi fondasi awal dari proses pembelajaran mahasiswa.

### **C. Penilaian/Asesmen Pembelajaran**

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Untuk dapat melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa maka dosen harus menguasai standar nilai, prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian. Penilaian yang dilakukan di Prodi APN Politeknik STIA LAN adalah sebagai berikut:

1. Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk

penilaian formatif dan penilaian sumatif.

2. Penilaian formatif bertujuan untuk:
  - a. Memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. Memperbaiki proses pembelajaran.
3. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
5. Penilaian hasil belajar diserahkan kepada Dosen dan/atau tim Dosen pengampu.
6. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam angka dan huruf sebagai berikut:

**Tabel 10 Rentang Penilaian**

| <b>Nilai Angka<br/>Skala 0 – 100</b> | <b>Nilai<br/>Huruf</b> | <b>Bobot<br/>Nilai Huruf</b> |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 90 – 100                             | A                      | 4                            |
| 80 – 89,99                           | A-                     | 3,7                          |
| 75 – 79,99                           | B+                     | 3,3                          |
| 70 – 74,99                           | B                      | 3                            |
| 65 – 69,99                           | B-                     | 2,7                          |
| 60 – 64,99                           | C+                     | 2,3                          |
| 55 – 59,99                           | C                      | 2                            |
| 50 – 54,99                           | C-                     | 1,7                          |
| 45 – 49,99                           | D                      | 1                            |
| 0 – 44,99                            | E                      | 0                            |

7. Ketentuan Penilaian
  - a. Nilai kelulusan minimum suatu mata kuliah adalah C, kecuali nilai minimum mata kuliah Statistika, Metodologi Penelitian, Agama, Kewarganegaraan, Pancasila, dan Bahasa Indonesia adalah B.



- b. Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan nilai akhir yang telah diumumkan.
- c. Jika Dosen tidak menyerahkan nilai hingga batas waktu penilaian maka mahasiswa akan diberikan nilai sesuai batas nilai minimum kelulusan.
- d. Apabila ada mahasiswa yang keberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen maka mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada dosen paling lambat lima hari kerja setelah nilai diumumkan.

#### **D. Penilaian/Asesmen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Asesmen CPL dilakukan dan digunakan sebagai bukti kepada pemangku kepentingan tentang tingkat kinerja peserta didik terkait dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan bersama, sehingga sangat berbeda dengan penilaian huruf mutu mata kuliah. Asesmen CPL juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi program studi untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, asesmen CPL harus mampu menjawab:

1. Apa yang diharapkan dari peserta didik setelah menyelesaikan program?
2. Sejauh mana lulusan memenuhi harapan tersebut?
3. Bagaimana memperbaiki program agar lebih baik lagi dalam memenuhi harapan tersebut?

Penilaian atau asesmen CPL merupakan proses kritis untuk memastikan bahwa lulusan program studi telah memenuhi seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Asesmen ini bersifat holistik dan akumulatif mencakup tiga ranah utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berbeda dengan penilaian mata kuliah yang bersifat parsial, asesmen CPL mengintegrasikan seluruh pengalaman pembelajaran mahasiswa selama masa studi.

Prinsip Asesmen CPL yang pertama haruslah berbasis bukti (evidence-based). Penilaian didukung oleh bukti autentik seperti portofolio, laporan magang, penerimaan produk proyek inovasi, atau sertifikat kompetensi. Kedua, instrumen asesmen harus valid dan reliabel untuk mengukur dimensi CPL yang ditargetkan secara akurat. Standar penilaian mengacu pada deskripsi generik jenjang KKNI dan Standar Kompetensi Lulusan. Ketiga, asesmen CPL juga diminta untuk terintegrasi dengan dunia kerja. Disini perlu adanya pelibatan pemangku kepentingan eksternal seperti K/L/D penerima lulusan dan organisasi profesi dalam merancang dan mengeksekusi asesmen.

Metode asesmen CPL dapat dilakukan dengan

1. Uji Kompetensi. Mahasiswa wajib menempuh uji kompetensi berbasis industri misalnya sertifikasi oleh BNSP. Hasil uji ini menjadi indikator penguasaan hard skill dan soft skill mahasiswa.
2. Penilaian Portofolio. Ini mengkompilasi bukti pencapaian CPL selama studi dan bisa berbentuk sertifikat magang, laporan magang yang dilakukan mahasiswa.
3. Tugas Akhir harus merefleksikan kemampuan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Sehingga dimungkinkan untuk adanya skripsi atau tugas akhir berbasis proyek yang menysasar langsung pada masalah spesifik di instansi mitra. Tugas akhir mahasiswa Program Sarjana terapan Prodi APN dapat berbentuk: a) skripsi; atau b) non skripsi dalam bentuk prototipe, atau proyek (*project based*) yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan pada masing-masing Program Studi.
4. Penelusuran alumni (*Tracer Study*). Penelusuran alumni mengevaluasi kinerja lulusan di dunia kerja melalui survei kepuasan pengguna. Data ini bisa digunakan untuk mengoreksi kesenjangan antara CPL yang ditetapkan dengan kebutuhan aktual instansi.

Hasil asesmen CPL kemudian dilaporkan dalam Dokumen Evaluasi Perkuliahan dan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan dalam penetapan kurikulum dan dokumen dukung akreditasi prodi. CPL yang tidak tercapai oleh suatu kohort mahasiswa wajib direspon dengan review menyeluruh terhadap desain kurikulum, metode pembelajaran, dan sumber daya.

## **BAB IV**

### **EVALUASI KURIKULUM**

Evaluasi Kurikulum Program Sarjana Terapan Prodi APN di Politeknik STIA LAN dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin relevansi, efektivitas, dan kesesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta kebutuhan pemangku kepentingan. Proses evaluasi mencakup dua pendekatan utama yaitu.

#### **A. Evaluasi Kurikulum oleh Internal Perguruan Tinggi Vokasi**

Evaluasi kurikulum Program Sarjana Terapan Prodi APN dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pihak internal, yaitu mahasiswa dan dosen yang terakomodir dalam rapat internal dosen-mahasiswa yang dilakukan secara berkala di awal dan akhir semester. Selain itu, evaluasi kurikulum juga mempertimbangkan kebutuhan pihak eksternal mencakup instansi pengguna dan non-pengguna melalui *tracer study* dan penyelenggaraan agenda *stakeholder meeting* yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, tracer study dilaksanakan kepada instansi-instansi pengirim mahasiswa. Adapun beberapa indikator kepuasan yang digunakan untuk mengukur Kepuasan Instansi yang Mengirimkan dan Memanfaatkan Alumni tahun 2021 yaitu: (1) Integritas alumni dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; (2) Keahlian alumni sesuai dengan bidang ilmunya; (3) Penguasaan teknologi dalam memperlancar pelaksanaan tugas; (4) Penguasaan teknologi informasi dalam memperlancar pelaksanaan tugas; (5) Kemampuan komunikasi alumni; (6) Kepemimpinan dan kemampuan pengembangan organisasi; (7) Kemampuan bekerjasama dalam tim dan membangun jejaring; dan (8) Inisiatif pengembangan diri untuk kemajuan organisasi.

Persentase kepuasan instansi yang mengirimkan dan memanfaatkan alumni di tahun 2024 telah melebihi target yang

ditetapkan. Dari target persentase kepuasan yang ditetapkan sebesar 96,2%, pada tahun 2024 sebesar 96,4% menunjukkan instansi yang mengirimkan dan memanfaatkan alumni menyatakan puas dengan kualitas lulusan Politeknik STIA LAN. Pengumpulan data kepuasan instansi yang mengirimkan alumni tersebut dilakukan melalui tracer study yang dilakukan kepada atasan alumni.

Jika dibandingkan dengan persentase kepuasan instansi yang mengirimkan dan memanfaatkan alumni pada tahun lalu, terlihat bahwa angka persentase kepuasannya meningkat. Secara umum capaian tahun 2024 menunjukkan bahwa instansi yang mengirimkan dan memanfaatkan alumni puas dengan kualitas alumni yang menunjukkan kualitas proses pembelajaran yang diselenggarakan di Politeknik STIA LAN.

Sedangkan pelaksanaan *stakeholders meeting* telah dihadiri oleh berbagai pimpinan dan praktisi dari BUMN/BUMD, Kementerian/Lembaga/Badan dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kebutuhan profil lulusan administrasi pembangunan negara dari instansi pengguna maupun non-pengguna secara menyeluruh dan mendalam. Program studi juga melakukan kunjungan ke/dari instansi lain (*benchmarking*) untuk mendapatkan informasi mengenai tantangan ke depan dan kebutuhan program studi. Bersama dengan pimpinan, perwakilan dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, baik jenjang Sarjana maupun Magister Terapan, telah menyelenggarakan *benchmarking* dari/ke instansi lain dalam rangka evaluasi dan pengembangan prodi. Informasi-informasi hasil *brainstorming* dari berbagai pihak kemudian dikembangkan oleh pakar bidang ilmu program studi melalui penyesuaian RPS serta mengikuti penyusunan mata kuliah keprofesian IAPA dan asosiasi profesi lainnya yang relevan melalui rapat internal pimpinan dan program studi bersama dosen.

Program Sarjana Terapan Prodi APN Politeknik STIA LAN memiliki dokumen kurikulum yang dapat diakses oleh mahasiswa dan stakeholder lain pada laman website Politeknik STIA LAN. Dokumen

kurikulum tersebut disusun berdasarkan profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 dan mengadaptasi capaian pembelajaran dari IAPA, bahan kajian IAPA, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu SN-Dikti dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi.

#### **B. Evaluasi Kurikulum oleh Eksternal Perguruan Tinggi Vokasi**

Secara garis besar, pengembangan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara dilakukan dengan kristalisasi informasi terkait pengembangan ilmu pengetahuan bidang administrasi negara dari organisasi IAPA, berbagai instansi pemerintah pengguna maupun non-pengguna, sekolah tinggi PTKL/non-PTKL, serta mempertimbangkan perubahan masa depan melalui analisis SWOT mengenai kondisi internal dan eksternal pendidikan Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN. Informasi-informasi tersebut menjadi rujukan dalam proses evaluasi dan reviu kurikulum, serta pembaharuan/penyesuaian RPS dengan mengundang para pemangku kepentingan.

Evaluasi kepada pengguna lulusan dilakukan dengan menyebarkan form tracer study. Hasil dari tracer study ini bisa menjadi salah satu pertimbangan perbaikan kurikulum agar bisa lebih mengakomodir instansi pengguna lulusan. Selain itu evaluasi juga diberikan oleh asosiasi profesi, dengan bergabungnya Politeknik STIA LAN pada IAPA, kurikulum prodi dirancang untuk dapat mengakomodir studi administrasi publik secara luas. Evaluasi juga dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menguji apakah dari segi kurikulum, luaran akademik, sumber daya manusia, anggaran, sarpras, dan lain-lain telah memenuhi matriks penilaian pada 9 kriteria.